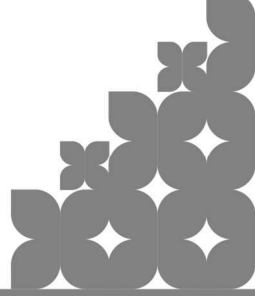


**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR DANA MITRA SAKTI
TAHUN 2025**



**Jl. Profesor M. Yamin No. 51 Kel. Karang Pucung, Kec.
Purwokerto Selatan
TELEPON: 0281-7780449**



Purwokerto, 28 April 2026

Nomor : 045/BPR-DMS/PWT/IV/2026

Lampiran : 16 lembar

Kepada Yth,

Pemegang Saham PT BPR Dana Mitra Sakti

Otoritas Jasa Keuangan

DPP Perbarindo

Majalah Media BPR

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir.

Purwokerto, 28 April 2026

Hormat kami

Pujiyono

Direktur



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Mitra Sakti

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039428-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600695-24042026160656

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

rbbpr_dmsakti@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-24 16:06:56



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses penerimaan laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Dana Mitra Sakti
Alamat	Jalan M. Yamin 51 Karangpucung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Nomor Telepon	0281-7780449

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Dana Mitra Sakti pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Dana Mitra Sakti memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Dana Mitra Sakti dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Purwokerto. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Dana Mitra Sakti didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Dana Mitra Sakti.

BPR Dana Mitra Sakti telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Dana Mitra Sakti selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Dana Mitra Sakti terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--	----------------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut

cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	PUJIONO
	Jabatan	Direktur

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (2) Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (4) Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan dengan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan mengingat NPL yang sedang tinggi dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Jabatan	Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan revidi atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil revidi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan serta bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris merupakan upaya pengawasan dini Dewan Komisaris melakukan:
 - evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris agar dilaksanakan secara efektif; dan
 - pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sehingga kegiatan operasional BPR berjalan baik dan tidak ada temuan berulang
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bentuk pemanfaatan BPR seperti pemanfaatan fasilitas anggota Dewan Komisaris tanpa memperhatikan kebijakan internal dan kelaziman sehingga merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

2.	Nama	I Gede Suprapta
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan serta bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris merupakan upaya pengawasan dini Dewan Komisaris melakukan:
 - evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris agar dilaksanakan secara efektif; dan
 - pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sehingga kegiatan operasional BPR berjalan baik dan tidak ada temuan berulang
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bentuk pemanfaatan BPR seperti pemanfaatan fasilitas anggota Dewan Komisaris tanpa memperhatikan kebijakan internal dan kelaziman sehingga merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Penerapan program APU-PPT
2. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Mitra Sakti tahun 2026.
3. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
4. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.
5. Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite
Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	PUJIONO
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Gede Suprapta
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Nama Kelompok Usaha BPR	BPR Depo Mitra Mandiri
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR
8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	PUJIONO
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Gede Suprapta
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	PUJIONO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Gede Suprapta
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	PUJIONO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Fasika Khaerul Zaman
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Gede Suprpta
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp167.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp204.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp42.629.628
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp12.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp25.333.333
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp40.500.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp7.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	3,01 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,25 : 1
-------------	-----------------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,60 : 1
-------------	-----------------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,22 : 1
-------------	-----------------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	14 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris dengan kesimpulan: 1. NPL masih tinggi sehingga perlu strategi untuk menurunkan NPL, yaitu dengan melakukan monitoring dengan baik, demikian juga untuk kredit Dalam Perhatian Khusus agar ditekan atau setidaknya tidak meningkat. 2. Pertumbuhan kredit yang diharapkan sudah tercapai namun pendapatan bunga kredit belum tercapai. 3. Rasio-rasio yang menjadi perhatian dimana melebihi dari tolak ukur yang ditetapkan adalah NPL Gros, NPL Net, ROA, BOPO dan LDR 4. Dalam mengelola Pendapatan dan Biaya sebaiknya mengacu pada Prinsip Minimax yaitu Minimal Pendapatan dan Maksimal Biaya, yang mana realisasinya tidak sesuai dengan prinsip ini yaitu Pendapatan Belum tercapai sedangkan Biaya Sudah Melebihi dari target.		
2.	Tanggal Rapat	07 Februari 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi dan pejabat Eksekutif dengan kesimpulan: 1. Monitoring dilakukan mulai dari tingkat kepala kas, koordinator marketing, dan kepala bagian bisnis untuk memaksimalkan kinerja. 2. Upaya penurunan NPL dengan monitoring kartu rapat dan pembinaan oleh pic dan supervisor serta Direksi 3. Penanganan hapusbuku dengan pemberian ulang surat peringatan dan pemasangan plang pada agunan. 4. Tindak lanjut pemeriksaan OJK sudah disampaikan kepada OJK dengan no. surat 016/BPR-DMS/PWT/I/2025		
3.	Tanggal Rapat	19 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris dengan kesimpulan: 1. Belum tercapainya target penghimpunan Asset, Kredit, Tabungan, Deposito, dan laba 2. NPL masih tinggi sehingga perlu strategi untuk menurunkan NPL, yaitu dengan melakukan monitoring dengan baik, demikian juga untuk kredit Dalam Perhatian Khusus agar ditekan atau setidaknya tidak meningkat. 3. Rasio-rasio yang menjadi perhatian dimana melebihi dari tolok ukur yang ditetapkan adalah NPL Gros, NPL Net, ROA, BOPO dan LDR 4. Dalam mengelola Pendapatan dan Biaya sebaiknya mengacu pada Prinsip Minimax yaitu Minimal Pendapatan dan Maksimal Biaya, yang mana realisasinya tidak		

sesuai dengan prinsip ini yaitu Pendapatan Belum tercapai sedangkan Biaya Sudah Melebihi dari target.

4.	Tanggal Rapat	14 April 2025
----	---------------	---------------

	Jumlah Peserta	8 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Direksi dan pejabat Eksekutif dengan kesimpulan:

1. Membuat link plan aplikasi yang akan cair untuk bulan berjalan untuk melihat bahan yang sudah on hand.
2. Pencairan kredit di optimalkan di minggu 1,2, dan 3 agar minggu ke 4 fokus ke collection dan aplikasi bulan berikutnya
3. Pemaparan Laporan Penunjang Operasional
4. Pemaparan Laporan PE Kepatuhan
5. Pemaparan Laporan PE Manajemen Risiko
6. Pemaparan Laporan PE APUPPT dan PPPSPM
7. Pemaparan Laporan PE Audit Internal

5.	Tanggal Rapat	03 Desember 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris dengan kesimpulan:

1. Direktur Bisnis telah berupaya dengan sebaik- baiknya meningkatkan produksi, namun karena adanya pencairan deposito yang besar mempengaruhi pencairan kredit, untuk menjaga Cash Ratio.
2. Belum tercapainya target penghimpunan Tabungan, Deposito, Kredit, Aset dan laba
3. NPL masih tinggi sehingga perlu strategi untuk menurunkan NPL, yaitu dengan melakukan monitoring dengan baik, demikian juga untuk kredit Dalam Perhatian Khusus agar ditekan atau setidaknya tidak meningkat.
4. Rasio-rasio yang menjadi perhatian dimana melebihi dari tolok ukur yang ditetapkan adalah NPL Gros, NPL Net, ROA, BOPO dan LDR.
Dalam mengelola Pendapatan dan Biaya sebaiknya mengacu pada Prinsip Minimax yaitu Minimal Pendapatan dan Maksimal Biaya, yang mana realisasinya tidak sesuai dengan prinsip ini yaitu Pendapatan Belum tercapai sedangkan Biaya Sudah Melebihi dari target.
5. SOP APU PPT dan PPPSPM untuk segera disempurnakan
6. Hasil Audit dibuat Daftar Pemantauan yang perlu disempurnakan dan agar dimonitor pelaksanaan perbaikannya dengan baik.
7. Keputusan rapat antara Direksi dan Para PE agar dijalankan dengan sebaik-baiknya
8. Rapat antara PE. Audit Internal, dengan PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan, agar dilaksanakan secara periodic minimal setiap 3 bulan sekali yaitu saran Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November, karena di tahun 2025

6.	Tanggal Rapat	30 Desember 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris dengan kesimpulan:

1. Direktur Bisnis telah berupaya dengan sebaik-baiknya meningkatkan produksi, namun karena adanya pencairan deposito yang besar mempengaruhi pencairan kredit, untuk menjaga Cash Ratio.
2. Belum tercapainya target penghimpunan Tabungan, Deposito, Kredit, Aset dan laba
3. NPL masih tinggi sehingga perlu strategi untuk menurunkan NPL, yaitu dengan melakukan monitoring dengan baik, demikian juga untuk kredit Dalam Perhatian Khusus agar ditekan atau setidaknya tidak meningkat.
4. Rasio- rasio yang menjadi perhatian dimana melebihi dari tolok ukur yang ditetapkan adalah NPL Gros, NPL Net, ROA, BOPO dan LDR
5. Dalam mengelola Pendapatan dan Biaya sebaiknya mengacu pada Prinsip Minimax yaitu Minimal Pendapatan dan Maksimal Biaya, yang mana realisasinya tidak sesuai dengan prinsip ini yaitu Pendapatan Belum tercapai sedangkan Biaya Sudah Melebihi dari target.
6. SOP APU PPT dan PPPSPM untuk segera disempurnakan
7. Keputusan rapat antara Direksi dan Para PE agar dijalankan dengan sebaik-baiknya
8. Rapat antara PE. Audit Internal, dengan PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan, agar dilaksanakan secara periodic minimal setiap 3 bulan sekali yaitu saran Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November, karena di tahun 2025 ini belum dilakukan rapat maka sebaiknya dilakukan rapat untuk perdana pada bulan Juni 2025
9. Restrukturisasi kredit agar benar-benar mempertimbangkan factor risiko, agar benar-benar diperhatikan urgensi dari memberikan jangka waktu yang sangat Panjang dan bunga yang rendah.
10. Presentasi masing-masing Kantor Kas dan Team produksi sudah mencerminkan adanya prinsip profit center, agar terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya.
11. Persiapan Pelaksanaan CKPN
12. Direksi dan Team agatr segera menyiapkan Rencana Bisnis BPR Tahun 2026

7.	Tanggal Rapat	20 Mei 2025
-----------	---------------	--------------------

	Jumlah Peserta	5 orang
--	----------------	----------------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kesimpulan :

1. Penyelesaian kredit bermasalah di Banjarnegara dengan memaksimalkan eksekusi agunan
2. Kredit Chanelling dengan Koperasi Malika harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.
3. Penawaran Kredit dengan bunga spesial agunan cash collateral.
4. Pemaparan progres hapusbuku oleh Direksi dengan adanya beberapa pembayaran dari nasabah hapusbuku.
5. Mutasi karyawan (AO) dan perekrutan calon kepala kas Wangon

8.	Tanggal Rapat	24 Juni 2025
-----------	---------------	---------------------

	Jumlah Peserta	6 orang
--	----------------	----------------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kesimpulan :

1. Pananganan kredit bermasalah sudah mengarah pelaksanaan yang semakin baik dan agar ditingkatkan lebih lanjut, dengan melakukan pemantauan dan pencatatan dengan lebih baik
2. sudah terlihat perbaikan mengarah track yang baik hal ini tercermin dari ROA dan BOPO yang sudah menuju perbaikan
3. APU PPT dan PPSPM agar dilaksanakan dengan lebih baik, khususnya apabila ada nasabah yang risiko tinggi agar lebih dipantau dengan lebih baik.
4. Direksi dan seluruh team agar melaksanakan arahan dari Dewan Komisaris tersebut di atas.

9.	Tanggal Rapat	29 Oktober 2025
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	1 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kesimpulan :

1. Laba berjalan sudah menunjukkan hasil positif sejak Maret 2025, namun masih di bawah target RBB yang ditetapkan. Pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga (Tabungan dan Deposito), penyaluran kredit, serta aset masih belum mencapai target. Direksi diminta meningkatkan koordinasi antar unit kerja agar target dapat optimalkan pada Bulan November dan Desember 2025.
2. B. NPL Gross per September 2025 tercatat sebesar 13,78% dan NPL Netto sebesar 10,20%, masih di atas batas ideal. Direksi bersama tim kredit diminta menyusun rencana aksi penurunan NPL per debitur, dengan pemantauan ketat dan evaluasi bulanan. AO wajib melakukan kunjungan rutin minimal 1 kali per bulan terhadap debitur bermasalah dan nasabah hapus buku. Direksi agar segera menyusun strategi penyelesaian kredit bermasalah terutama pada debitur besar seperti: Yonhi Oskaria, Wartinah, Tuyaman, Aziz Akbar, dan Khaerul Lathif.
3. C. Saat ini posisi PE Audit Internal masih kosong karena pejabat sebelumnya menghadapi masalah hukum. Direksi diminta segera menunjuk pengganti agar fungsi pengawasan internal tetap berjalan.

10.	Tanggal Rapat	12 November 2025
-----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	8 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kesimpulan :

1. Direksi diminta memperjelas strategi penanganan kredit bermasalah secara rinci per debitur, khususnya Indrawati, Wartinah, dan Kasiron.
2. Pengadaan kendaraan diarahkan untuk menggunakan sistem sewa guna efisiensi biaya perawatan dan optimalisasi dua Kantor Kas (Wage dan Wangon) perlu diprioritaskan dengan rencana aksi yang lebih terukur.
3. Direksi diminta menambah gelombang Arisan Tadamas untuk meningkatkan penghimpunan dana tabungan.
4. Kebijakan CKPN di bawah 100 juta agar segera dipersiapkan dan diberlakukan.
5. Laba berjalan telah menunjukkan tren positif namun masih di bawah target
6. Penghimpunan DPK (Tabungan, Deposito), Kredit, Laba, dan Aset belum mencapai

target

7. NPL Gross dan NPL Netto masih tinggi, meski terjadi sedikit penurunan pada Oktober 2025. Direksi diminta melakukan langkah intensif untuk penurunan NPL.
8. Seluruh indikator utama RBB (Asset, Kredit, Tabungan, Deposito, Laba) masih belum mencapai target sehingga perlu perhatian penuh Direksi.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fasika Khaerul Zaman
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Gede Suprpta
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	7 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama tahun 2025 tidak terjadi fraud baik itu Pengurus ataupun karyawan

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Permasalahan Hukum Perdata yang telah selesai mengenai proses pengikatan agunan di

Notaris

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada pemberian dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR DANA MITRA SAKTI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 22 April 2026

PT BPR DANA MITRA SAKTI

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a small loop at the end.

Fasika Khaerul Zaman
Komisaris Utama